

Mitos Kalangenan:

Antara Prestise dan Pelestarian Lingkungan.

Drs. Dede Kosasih, M.Si

Purwawacana

Manusia, di mana pun baik secara langsung maupun tidak, bahkan seringkali tanpa disadarinya, untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya akan selalu bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya itu tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan di mana manusia mempengaruhi dan merubah lingkungannya. Dengan kata lain, manusia juga turut menciptakan corak dan bentuk lingkungannya. Manusia, dari satu segi menjadi bagian dari lingkungan fisik dan alam tempatnya hidup; tetapi dari segi yang lain lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup adalah bagian dari dirinya.

Kerangka landasan yang menciptakan dan membuat manusia bergantung pada lingkungannya adalah kebudayaan. Dengan demikian, manusia, kebudayaan dan lingkungan merupakan tiga faktor yang saling menjalin secara integral. Pernyataan ini berakar dari pandangan Slotkin (dikutip oleh Adimihardja, 1993:1) bahwa *"the organism and its environment must be suited to each other"*. Pandangan ini mengisyaratkan perlunya hubungan timbal balik yang serasi dan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian, suatu jenis mahluk hidup akan dapat mempertahankan kelangsungan eksistensinya sepanjang merasa sebagai bagian integral dari lingkungan hidupnya serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Lingkungan alam dapat memberikan daya dukung kehidupan dalam berbagai bentuk kemungkinan yang dapat dipilih manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Menurut Forde (1963: 463) bahwa hubungan antara kegiatan manusia dengan lingkungan alamnya dijumpai oleh pola-pola kebudayaan yang dipunyai manusia. Oleh karena itu, pengembangan pilihan-pilihan itu sangat bergantung pada potensi kebudayaan manusia yang menurut kenyataan sejarah dapat berkembang secara pesat karena kemampuan akalunya.

Selain berupa alam, lingkungan tempat manusia hidup juga mencakup lingkungan sosiobudaya, dan oleh karena itu konsep manusia harus dipahami sebagai mahluk yang bersifat *biososiobudaya* (Adimihardja, 1993:1). Dalam konsep biososiobudaya tersebut, keseluruhan pengetahuan manusia harus digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan untuk membentuk tingkahlakunya dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1980:20). Dalam definisi ini, kebudayaan dapat dilihat sebagai "mekanisme kontrol" bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973a), atau sebagai "pola-pola bagi kelakuan manusia" (Keesing & Keesing, 1971). Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan, petunjuk, dan resep yang terdiri dari serangkaian model kognitif yang digunakan secara selektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972).

Maka melalui kebudayaan itulah manusia membina interaksi dengan sesamanya dan dengan alam, serta mewariskan nilai-nilai yang dianggap bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi.

Manusia sebagai Mandat Kultural Lingkungannya

Manusia merupakan pusat kehidupan dalam arti kelebihan akal budinya, maka mahluk yang bernama manusia itu mempunyai kedudukan yang tinggi apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan kelebihan akal budinya tersebut manusia memiliki mandat kultural, yang terkait dengan pengelolaan, pengaturan, dan pemeliharaan lingkungan hidup dari kerusakan (Sastrosupeno, 1984). Dengan demikian manusia sendirilah yang sebenarnya menjadi tujuan lingkungan hidup sebagaimana terwujud dalam berbagai bentuk pemanfaatan

yang ditarik dari padanya. Dari mandat kultural inilah kemudian berkembang menjadi sistem mata pencaharian, teknologi maupun berbagai bentuk kegiatan yang bersifat ritualistik.

Namun ternyata dalam kaitan sebagai pengemban mandat kultural itu, seringkali muncul dikotomisasi secara ekstrem antara manusia di dunia belahan Barat dengan manusia di dunia belahan Timur. Manusia dunia Barat sering diidentifikasi dengan konsep manusia menaklukkan lingkungan. Sebagai kontrasnya manusia dunia Timur sering diidentifikasi sebagai manusia yang menganut konsep menjaga keutuhan dan keharmonisan dengan lingkungan (*Glaken. 1972*). Dua konsep yang berbeda dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan tersebut menghasilkan dampak lingkungan yang sangat berbeda pula. Konsep dunia Barat terbukti telah melahirkan persoalan besar bagi lingkungan, akibat pengrusakan dan pencemaran yang ditimbulkannya. Namun, ketika manusia Barat mulai menyadari akan kekeliruannya maka manusia di dunia belahan Timur dengan program modernisasi dan pembangunannya, justru mengikuti dan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan dunia Barat (Nawiyanto, 1995).

Dewasa ini di dunia belahan Timur (negara-negara sedang berkembang), sedang berlangsung pembukaan dan penghancuran yang membabi-butakan hutan basah, dengan tingkat pengrusakan 11,4 juta hektar pertahun atau 21,6 hektar per-menit. Dengan adanya sistem perladangan berpindah-pindah, didirikan pemukiman baru, peternakan yang berskala raksasa dan industri kehutanan, adalah sebab utama rusaknya hutan (Salim, 1988). Hal ini seyogyanya tak perlu terjadi, bila kita mencermati cara bertindak nenek moyang kita dalam hubungan dengan hutan yang begitu mesra, selaras dan dihadapi secara arif.

Seperti yang dipaparkan Mochtar Lubis (1988), bahwa di antara nilai budaya tua suku-suku bangsa Indonesia adalah nilai budaya yang membawa manusia berhubungan erat dengan alam sekitarnya. Kepercayaan nenek moyang kita di jaman dahulu, bahwa setiap benda, selain dari makhluk hidup, memiliki pula jiwa atau roh sendiri. Dengan demikian telah menimbulkan kesadaran untuk memelihara keselarasan antar kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Sebagai salah satu contoh kearifan dalam menyikapi lingkungan yang kini masih dipelihara, cukuplah kita menengok ke Cibeo, di lereng pegunungan Banten Selatan. Di wilayah itu kita bisa jumpai yakni orang Baduy. Sebenarnya mereka lebih sering dan lebih senang menyebut diri dengan sebutan *Urang Rawayan* (Haryoto Kunto, 1986:649).

Urang Rawayan yang menganggap dirinya sebagai manusia wiwitan (yang mula ada), terkenal sebagai masyarakat yang kuat memegang adat tradisi (*talari karuhun*), nenek moyangnya. Banyak pantangan, tabu atau *pamali* yang menguasai gerak hidup mereka sehari-hari.

Masyarakat yang terbilang masih lugu (*basajan*) dan polos, sebenarnya banyak menyimpan adat tatanan hidup dan kepercayaan yang menarik. Kehidupan mereka yang sangat kuat memegang tradisi ini menjadikan mereka sangat akrab dengan alam sekelilingnya. prinsip hidup yang paling mendasar, dipegang teguh oleh *Urang Rawayan* adalah *Pikukuh Baduy*. Salah satunya yakni mengemban tugas dari *Batara Cikal* untuk menjaga dan melestarikan bumi beserta segenap isinya! dalam bahasa mereka: "*Ngaraksa Sasaka Pusaka Buana, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung* (Garna, 1988:ii).

Mereka sangat patuh dan yakin kepada *pikukuh* yakni perintah dan petuah para leluhurnya, agar hidup menjalankan "pola hidup sederhana". Dengan tujuan ahir untuk menjaga perdamaian dan *karahayuan* sehingga terciptalah keselamatan dan kelestarian hidup seisi dunia.

Ngaraksa Sasaka Pusaka Buana mengandung makna menjaga warisan suci di atas bumi. Adapun arti "warisan suci di atas bumi" ialah kelestarian alam yang masih terjaga, tanah yang tetap subur *ma'mur loh jinawi*, sumber air yang belum tercemar, udara yang masih bersih sehat belum kena polusi. Serta bumi yang masih terjaga keseimbangan ekologisnya; tetap *saluyu rahayu*, harmonis di antara seluruh penghuninya. Sedangkan *lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung*, artinya; panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. *Pikukuh* ini merupakan hakikat dari prinsip konservasi *Urang Rawayan* yang menyatakan menjaga dan melestarikan kelangsungan proses perubahan alamiah secara wajar.

Namun kini apa yang terjadi? Ternyata banyak orang Indonesia dalam memperlakukan lingkungan hidupnya semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomis belaka. Belakangan ini semakin banyak disaksikan adanya perusakan lingkungan hidup yang semakin menjadi-jadi sehingga sudah mencapai taraf sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan serius. Jika orang dahulu akan menebang sebuah pohon tua dan besar umumnya tidak mau atau amat segan. Mereka baru akan mau apabila telah melakukan ritual tertentu, karena di mata mereka pohon besar itu merupakan suatu benda hidup yang mempunyai jiwa dan roh serta sakral.

Sangat kontras dengan kondisi sekarang di mana kekayaan hutan yang ada telah dimanfaatkan dengan sikap yang sangat eksploitatif demi mengejar keuntungan ekonomi sesaat. Padahal tak diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di antara khasanah sumber genetika yang paling kaya di dunia. Tak salah pula bila orang mengatakan bahwa Indonesia begitu kaya dengan satwa yang sangat beragam. Menurut Haryoto Kunto (1986:689) dari salah satu jenis saja, upama burung (avifauna) indah, ternyata dari hasil penelitian Jean Declacour pada tahun 1947, Pulau Jawa terdapat 337 jenis, Kalimantan 420 jenis, dan Sulawesi termasuk Papua 220 jenis. Jadi yang ada di Indonesia saja, paling sedikit ada 977 jenis burung yang sempat dikenali.

Namun sayang sekali, dewasa ini terbilang ratusan mungkin lebih jenis satwa liar dan burung telah punah di muka bumi. Dalam *Kompas* 16 April 2001 Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephutbun, menjelaskan bahwa: Indonesia sekarang ini memiliki daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, mencakup 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis Reptilia. Ini akibat adanya peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan kualitas hidup yang berdampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang kenyataannya tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

Itu sebabnya, negara-negara yang sadar akan kelestarian lingkungan berusaha menyelamatkan jenis-jenis satwa dan burung melalui berbagai macam cara (ibid, 1986:713). Kerjasama internasional untuk mencegah perdagangan gelap satwa liar yang dilindungi itu, dikenal sebagai "Persetujuan Washington". Persetujuan ini merupakan perjanjian internasional yang ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1981, oleh para wakil dari 83 negara peserta. Selain itu, "Persetujuan Washington 1981" memuat pula lampiran daftar satwa liar yang dilindungi dari seluruh dunia, yakni:

- 227 jenis "*Mamalia*" (binatang menyusui)
- 190 jenis "*Aves*" (burung)
- 79 jenis "*Reptilia*" (binatang melata)
- 12 Jenis "*Amphibia*" (binatang amfibi)
- 25 jenis "*Pisces*" (ikan)
- 26 jenis "*Mollusca*" (binatang lunak)
- 4 jenis "*Insecta*" (serangga)
- 1 Jenis "*Anthozoa*" (binatang koral).

(Tim Inskipp & Sue Wells, *Internationale Handel in Wilde en Platen*, 1981)

Namun dalam kenyataannya meski berbagai langkah telah ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menyelamatkan satwa dan jenis burung langka ini, penangkapan, perburuan liar dan perdagangan satwa gelap dan burung yang dilindungi, masih saja berlangsung. Contoh kasus pemberitaan (*Kompas*, 28-4-2001), bahwa perburuan satwa yang dilindungi, di berbagai kawasan di Prov. Jambi terus marak. Jenis satwa yang diincar para pemburu itu antara lain: Harimau Sumatra (*Phantera Tigris Sumatrae*), rusa atau sambar (*cervus unicolor*), kambing hutan atau kambing Sumatra (*Capricornis Sumatrensis*), Gajah (*Elephas Maximus*) dan satwa lainnya diduga kuat terus diburu adalah badak (*Dicerorhinus Sumatrensis*). Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan kita. Kita menjadi miris manakala membayangkan bangkai-bangkai tergeletak menjadi tulang belulang. Yang lebih sadis dan tragisnya lagi ternyata hasil perburuannya itu tidak selamanya untuk dipelihara, melainkan hanya untuk "seenggok" cula atau gading dan kulitnya mereka secara membabi buta membantai satwa yang seharusnya dilestarikan demi menjaga sistem ekologis.

Terjadinya berbagai kasus pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, jika diperhatikan ternyata disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, sebahagian di antaranya ada yang digerakan oleh "*dorongan ekonomis*", karena satwa tersebut mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi, sehingga mendatangkan keuntungan yang sangat besar. *Kedua*, ada yang didorong karena "*alasan psikologis*", demi peruntungan dan kepuasan batiniah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan digerakan oleh alasan *ketiga*, yaitu berkaitan dengan "*nilai sosio-kultural*" yang mempunyai akar ke masa silam. Hal ini bisa dibilang unik karena memperlihatkan adanya *kontinuitas* maupun *diskontinuitas* historis (Nawiyanto, 1995).

Tulisan ini akan difokuskan untuk menyoroiti dan mengungkap dimensi sosiokultural tentang budaya *kalangenan* terhadap satwa dan burung secara diakronis dengan membandingkan masa *bihari* dan masa *kiwari*. Kemudian akan dicoba dikaitkan antara budaya pemeliharaan satwa *kalangenan* dengan mitos, prestise dan isu-isu pelestarian lingkungan.

"Kalangenan": sebuah mitos

Manakala mendengar, melihat suatu objek atau suatu peristiwa yang dialami, biasanya orang cenderung akan menghubungkan dengan apa yang pernah terjadi (pengalaman) sebelumnya. Tidak jarang hal ini dilihat sebagai sebuah peringatan akan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang (*kila-kila, totonden, tangara*). Salah satu kekhasan manusia ialah mencoba menghayati kembali pengalaman masa lampau serta menempatkan diri ke masa yang akan datang. Kini, dan masa yang akan datang merupakan suatu jaringan peristiwa, atau *network of event* (Daeng, 1991).

Jika dilakukan penelusuran secara historis-diakronis mengenai pemeliharaan satwa langka, dalam istilah Sunda disebut *kalangenan*, ternyata budaya kalangenan ini telah berkembang sejak masa yang lampau. Kalangenan pemeliharaan satwa ini terjadi terutama di kalangan elit tradisional khususnya raja termasuk abdi-abdinya (*para menak*). Jenis satwa yang dipelihara sebagai satwa kalangenan biasanya tidak hanya satu macam saja, melainkan sangat beragam, misalnya: *kuda, kerbau, burung (perkutut), gajah, kijang, harimau, beruang, dll*.

Di sisi lain yang menarik untuk dicermati, ternyata dengan adanya budaya *kalangenan* itu muncul kreativitas berupa sistem pengetahuan untuk mengklasifikasikan ciri fisik maupun watak (karateristik) dari satwa-satwa dan burung itu yang dikenal dengan *caturangga*. Istilah *caturangga* ini sebenarnya lebih spesifik menunjuk pada karakteristik kuda dan burung (perkutut, puyuh), termasuk ayam adu. Menurut Satjadibrata dalam (Sudaryat, 1997:133) yakni pengetahuan mengenai ciri-ciri lahiriah dari satwa itu yang bisa memberikan gambaran watak baik buruknya untuk dipelihara. Sebagai contoh misalnya, istilah *Satria Pinayungan* (lihat Hadi, 1991, Sudaryat, 1997) dalam *caturangga* kuda, ditandai oleh uir-uir (*kukulinciran*) pada bagian tubuh kuda, yakni di bagian punggung dekat ujung *sela* (tempat duduk) sebelah kanan. Ciri-ciri kuda seperti inilah biasanya sangat diminati dan dipuja orang, karena dianggap akan memberikan berkah dan keberuntungan, kebahagiaan dan kemuliaan bagi yang memeliharanya.

Kaitannya dengan hal itu, pada jaman lampau ada anggapan yang sangat melekat, - tentu saja anggapan dari pihak penguasa- bahwa semakin banyak satwa kalangenan yang dipelihara, maka pengaruhnya bagi kedudukan raja (penguasa) akan semakin baik dan mantap (Nawiyanto, 1995).

Mengapa demikian? Hal ini berkaitan erat dengan konteks nilai-nilai sosiokultural masyarakat tradisional yang bersifat *mitis-magis*. Raja yang berkuasa sebagai pusat alam semesta (makrokosmos) dituntut untuk mampu mengakumulasi dalam dirinya sebanyak mungkin kekuatan sakti, demi kebesaran dan kewibawaan di mata rakyatnya. Kebesaran dan kewibawaan yang dimiliki raja dianggap akan dapat menjadi sumber yang mengalirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan alasan inilah para raja merasa perlu mengumpulkan berbagai kekuatan sakti yang terdapat di alam semesta dengan berbagai bentuk, baik yang natural maupun yang supranatural. Oleh sebab itu untuk mencapai kebesaran dan kewibawaan itu salah satunya adalah dengan cara mengkoleksi atau mengumpulkan beragam satwa (*kalangenan*) itu.

Maka tidaklah heran bila sang raja kemudian tidak mampu mengakumulasi kekuatan sakti tersebut, ujung-ujungnya bisa menimbulkan guncangan dan bencana besar (prahara). Konsekuensinya ia akan mudah tergeser dari kedudukan atas tahtanya. Dalam keadaan yang demikian, raja dapat dipandang tidak mampu (tidak berwibawa) sebagai pusat makro-kosmos maupun mikro-kosmos yang akan mendatangkan kemakmuran bagi rakyatnya. Hal ini mengakibatkan hak raja atas tahta tidak *legitimate* dan akan berpengaruh pada nilai keabsahannya. Memang seperti dikemukakan oleh Anderson (1991), bahwa tradisi pikiran politik Jawa (termasuk Sunda) sangat menekankan pentingnya kemampuan memusatkan kekuasaan sakti. Dalam istilah Bakdi Soemanto dalam Soesanto (1987), budaya ini merupakan cerminan dari masyarakat kita yang berwawasan *mitis* sebagai warisan dari nenek moyang, dan bukan wawasan *ontologis*. Sehingga anggapan bahwa terpusatnya semua daya "kasakten" itu ada pada diri raja. Oleh karena itu, tradisi ini harus terus menerus diupayakan melalui berbagai macam cara.

Satwa *kalangenan* itu dipandang sebagai sumber kekuatan sakti. Karakteristik satwa dengan sifat tertentu yang sering dijumpai dalam berbagai cerita tradisional bisa jadi merupakan petanda yang menunjukkan adanya keyakinan dan anggapan yang demikian. Begitu pula pemeliharaan satwa dilingkungan istana dianggap dapat menularkan karakter yang sama terhadap raja. Gajah sebagai contoh, merupakan satwa yang melambangkan kebesaran dan kekuatan.

Bentuk simbol adalah penyatuan dua hal dan luluh menjadi satu; dalam simbolisasi, subjek menyatukan dua hal menjadi satu. Mircea Eliade (Basis, 1991), pakar dalam ilmu Perbandingan Agama aliran *historikofenomenologis*, dalam bukunya yang berjudul *Beelden en Symbolen* (1963), menyatakan bahwa simbol mengungkapkan aspek-aspek terdalam dari kenyataan yang tidak terjangkau oleh alat pengenalan lain. Rupa simbol-simbol itu dapat berubah, tetapi fungsinya tetap sama. Simbol, mitos, dan ritus selalu mengungkapkan suatu situasi batas manusia dan tidak hanya suatu historis saja. Ilustrasi di atas berintikan lambang-lambang (simbol) yang mencetuskan pengalaman manusia.

Kalangenan sebagai suatu mitos, memberi arah kepada kelakuan manusia, dan merupakan semacam pedoman bagi manusia untuk bertindak bijaksana. Apa yang dikemukakan Van Peursen (1976) tentang fungsi mitos itu? Ternyata mitos menyadarkan manusia akan adanya kekuatan supranatural. Maka melalui mitos itulah manusia dibantu untuk dapat menghayati daya-daya itu sebagai sesuatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam dan kehidupan masyarakatnya. Mitos memberikan jaminan masa kini, dalam arti dengan mementaskan atau menghadirkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi dahulu.

Adanya keyakinan yang mendarah daging bahwa satwa *kalangenan* merupakan sumber kekuatan sakti, secara lebih mudah barangkali lebih terlihat dari pemberian nama masing-masing satwa *kalangenan* itu. Dalam konsep budaya Jawa, pemberian nama masing-masing satwa melalui pemberian atribut "kyai" atau "nyai" adalah hal yang lazim (Nawiyanto, 1995). Penyebutan yang demikian memperlihatkan bahwa kedudukan satwa *kalangenan* itu bisa disejajarkan dengan pusaka kerajaan, sebagai sumber daya "kasakten" bagi raja.

Budaya Kalangenan pada masa kini

Budaya pemeliharaan satwa sebagai *kalangenan* yang terjadi pada masa lalu ternyata masih terus hidup dan berkembang hingga sekarang ini. Hal lain yang menarik, bahwa budaya *kalangenan* tersebut ternyata kini tumbuh dan berkembang hanya terbatas di kalangan birokrat (pejabat) dan kelompok menengah ke atas saja. Harian Kompas 2 April 2001, memberitakan bahwa Sutiyoso Gubernur DKI, memelihara satwa yang dilindungi undang-undang yakni berbagai jenis burung dan dua *orang utan* (*pongo pygmaeus*), dan itu santer di kalangan pecinta satwa lindung. Bahkan mungkin masih banyak lagi 'gubernur-gubernur' lain termasuk para bupati sampai saat ini punya kebiasaan seperti itu. Sejumlah pejabat, termasuk yang baru dilantik menjadi petinggi (*jeneng*) yang mengurus hutan, juga dikabarkan memiliki *siamang* (*Hylobates Syndactylus*) yang dilindungi undang-undang.

Berkembangnya pemeliharaan satwa *kalangenan* di kalangan elit dan kaum "gedongan", bagi pejabat barangkali bisa dipahami karena adanya upeti (hadiah) dari para bawahan, termasuk rekanan bisnis yang telah diuntungkannya. Sedangkan bagi non pejabat dalam kaitannya dengan kemampuan ekonomis mereka yang lebih mantap dan memadai. Kenyataannya harga satwa *kalangenan* di pasaran sangatlah mahal, sehingga hanya kelompok "tertentu" yang berlebih dalam materi saja yang akan mau dan mampu membelinya. Karena bagaimanapun juga satwa-satwa itu memerlukan pemeliharaan dan perawatan yang sangat mahal. Jadi, orang yang keadaan ekonominya baru pada tahap subsistensi, kecil sekali kemungkinannya bisa menjangkau dan akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Keterbatasan kemampuan secara ekonomis kurang memungkinkan pengembangan, pemeliharaan satwa *kalangenan* di kalangan bawah.

Fenomena yang nampak dewasa ini, mungkin karena jenuh dengan keadaan yang serba *hi-tech*, orang cenderung berpaling kepada wujud dan nilai budaya lama. Mereka seolah-olah rindu pada masa yang lalu (romantisme). Akhirnya orang begitu antusias dan berkompetensi untuk memiliki lambang-lambang yang menjadi simbol-simbol modernitas budaya dan indikator budaya modern terutama di kalangan yang telah mencapai tahap kelimpahan ekonomi. Dengan memiliki simbol-simbol modernitas meningkatkan status dan prestise sosial mereka terangkat. Oleh karena mereka berupaya secara terus menerus meningkatkan status dan prestise sosial, mereka berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin simbol modernitas itu. Semakin banyak yang bisa diraih dan dimiliki maka akan semakin tinggi setatus sosialnya, akan berarti tinggi pula prestise yang dimilikinya. Modernitas budaya ternyata membawa implikasi sosial yang sangat dalam.

Simbol modernitas itu pada awalnya adalah barang dan jasa yang diproduksi industri modern, seperti: barang yang serba elektrik, mobil mewah, komputer dan juga rumah mewah dll. Termasuk pula di dalamnya *titel, gelar, pangkat* dan embel-embel lainnya. Namun, ketika semuanya sudah dimiliki secara kolektif, maka orang pun memerlukan lambang-lambang yang lebih eksklusif, biasanya lambang-lambang itu terdapat dalam lambang tradisional sebagai tanda keberlimpahan (*affluance*). Gejala demikian dalam istilah Kuntowijoyo (1987) disebut sebagai gejala *retradisionalisasi*. Oleh sebab itu, budaya pemeliharaan satwa *kalangenan* merupakan salah satu wujud kongkret gejala retradisionalisasi itu tadi.

Romantisme atau keinginan untuk kembali kepada lambang-lambang tradisional itu bukan berarti bahwa nilai-nilai *mitis-magis* kembali menjiwai budaya masyarakat kontemporer sekarang ini. Menurut pendapatnya (ibid, 1987) bahwa retradisionalisasi yang sedang berlangsung hanyalah sebatas pada tataran kulit muka (*fashion*). Kecenderungan demikian muncul ke permukaan itu lebih berhubungan dengan fenomena sosial yaitu sebagai lambang status untuk kepentingan prestise. Dengan kata lain, gejala budaya ini bukan dalam artian kembali ke pemikiran mitis-magis seperti pernah berkembang pada masa lampau.

Dengan konteks demikian inilah budaya *kalangenan* barangkali hanya konsep *diskontinuitas sejarah*. Wujud budayanya pada segi luar menunjukkan kesamaan, namun makna yang dimuatkan di dalamnya sudah jauh berbeda. Pada mulanya budaya pemeliharaan *kalangenan* mempunyai makna mitis-magis, kemudian sekarang telah berubah maknanya lebih bersifat sosiologis. Bisa juga dilihat dari perspektif *kontinuitas sejarah* hal ini merupakan pergeseran fungsi budaya pemeliharaan satwa *kalangenan* dari yang bersifat mitis-magis kepada fungsi magis-sosial.

Sebagai lambang modernitas, sebenarnya budaya *kalangenan* memelihara satwa merupakan harga yang sangat mahal bagi sebuah status dan prestise sosial. Mengapa? Karena prestise tersebut mempertaruhkan kelestarian satwa dan lingkungannya yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan peradaban manusia.

Penutup

Satwa sebagai salah satu komponen lingkungan hidup mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Satwa tidak hanya untuk dimanfaatkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis manusia akan bahan makanan untuk menjamin kelangsungan hidupnya semata. Lebih kompleks dari itu, manusia mestinya bisa bertindak secara lebih arif untuk membiarkan satwa yang kini telah langka hidup di alamnya demi

keseimbangan, keserasian dan kelestarian ekosistem hidup manusia serta memberikan manfaat sosio-kultural. Pada masyarakat yang bersifat tradisional, beberapa binatang dianggap mempunyai kekuatan tertentu yang merupakan sumber daya kesakten dan kekuatan magis. Konsepsi demikian membuat beberapa satwa dipakai sebagai salah satu sarana dalam rangka melegitimasi kekuasaan tradisional, bersama-sama dengan sarana lain.

Pemanfaatan satwa untuk kepentingan ekonomis pada masyarakat kontemporer sekarang ini barangkali semakin menonjol dalam iklim komersialisasi. Namun dalam segmen sosial tertentu dapat dijumpai pula kecenderungan pemanfaatan satwa untuk kepentingan kalangenan. Kecenderungan demikian menariknya hanya berlangsung terutama di kalangan masyarakat yang banyak mengkonsumsi simbol-simbol modernitas. Dalam segmen sosial ini pengembangan budaya kalangenan rupanya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis sebagai simbol prestise sosial.

Transformasi sosial akibat pembangunan yang telah melahirkan sejumlah kelompok menengah dan atas yang semakin besar, tampaknya bisa menimbulkan persoalan besar dalam kaitannya dengan pengembangan budaya pemeliharaan satwa untuk *kalangenan*. Permintaan yang semakin banyak dan melimpah terhadap satwa, terutama satwa langka konsekuensinya akan mengancam kelestarian satwa itu dan mengantarkan kepada terjadinya kepunahan. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat tradisional, karena sekalipun telah berkembang pemeliharaan satwa kalangenan tetapi jumlahnya sangat terbatas di kalangan raja dan elit kerajaan (*para menak*). Di samping itu, masih luasnya hutan yang menjadi ruang hidup bagi berkembangnya satwa, juga memungkinkan untuk berkembang biak secara leluasa. Berkembangnya budaya *kalangenan* pada masa sekarang ini tampaknya perlu ditangani secara arif dan serius agar fungsionalitasnya tetap memperhitungkan dimensi kelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

- Adimihardja, Kusnaka. 1993. *Kebudayaan dan Lingkungan: Studi Bibliografi*. Ilham Jaya, Bandung.
- Anderson, Bendict RO 'G. 1991. *Gagasan tentang Kekuasaan Dalam Budaya Jawa*, dalam Miriam Budiarto, ed. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Bintarto, R. 1979. *Metode Analisis Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Daeng, Hans. *Manusia, Mitos dan Simbol*. Dalam **Basis** edisi Januari 1991 XL No. 1 hal. 15.
- Forde, CD. 1963. *Habitat, economy and society*. New York: Dutton.
- Garna, Judistira K..1988. *Tangtu Telu Jaro Tujuh* (Desertasi). Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Geertz, C. 1973. *The impact of the concept of culture on the concept of man*. Dalam: *The interpretation of cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books. 126-141.
- Hadi, Ahmad. 1991. *Peperenian (Kandaga Unak-Anik, Rusiah Basa Sunda)*. Bandung. Geger Sunten CV.
- Harian *Kompas* edisi tgl. 2, 16, 28 April 2001.
- Kartodihardjo, Sartono. 1968. *Segi-Segi Kultural Historiografi Indonesia*. Lembaran Sejarah, No. 3, Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah FS UGM.
- Keesing, F.M & R.M Keesing. 1971. *New perspectives in cultural anthropology*. Chicago: Holt, Rinehart, and Winston.
- Kunto, Haryoto. 1986. *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung: PT. Granesia.
- Kuntowijoyo. 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Jogjakarta: PT. Tiara Wacana.
- Loebis, Mochtar. 1988. *Transformasi Budaya Untuk Masa Depan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Muchtar, dkk. 1982/1983. *Ungkapan Tradisional sebagai Informasi Kebudayaan Daerah Jawa Barat*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Jarahnitra).
- Nawiyanto, S. *Budaya Kelangkaan dan Isu Lingkungan*. Basis edisi Juli 1995 XLIV No. 7 hal 253.
- Peursen, C. van.1976. *Strategi Kebudayaan*. Diindonesiakan oleh Dick Hartoko, BPK Gunung Mulia Jakarta-Yayasan Kanisius Yogyakarta.
- Salim, Emil. 1988. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sastrosupeno, Supriyadi. 1984. *Manusia, Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sosesanto, PS. Hary. 1987. *Mitos: Menurut Pemikiran Mircea Eliade*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spradley, J.P. 1972. *Foundations of cultural knowledge. Dalam: Culture and cognition. Rules, maps and plans*. San Francisco: Chandler 2-38.
- Sumaatmaja, Nursid. 1996. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*. Alfabeta Bandung.
- Suparlan, Parsudi. 1980. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya Perspektif Antropologi Budaya*. Dalam: *Yang Tersirat dan Tersurat*. Fakultas Sastra: Universitas Indonesia.